



LAPORAN PENELITIAN
EVALUASI PEMANFAATAN PROGRAM KREDIT USAHA TANI
(KUT) DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Oleh

Supu Salehan, SE., M.Pd.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TERBUKA

2000

1. a. Judul Penelitian : Pemanfaatan Kredit Usaha Tani (KUT) di Propinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Bidang Penelitian : Studi Indonesia
- c. Klasifikasi Penelit. : Mandiri
- d. Bidang Ilmu : Pendidikan
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama : Supu Saleha, SE, M.Pd
 - b. NIP : 131 693 604
 - c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - d. Gol. Kepangkatan : Penata Tk.I, III/d
 - e. Jabatan Akademik : Lektor Madya
 - f. Unit Kerja : UPBJJ-UT Kendari
3. Anggota Tim Peneliti :
 - a. Jumlah Anggota : 2 (Dua) orang
 - b. Nama Anggota : 1. Drs. La Ode Turi, M.Pd
2. Drs. Andi Basru Wawo
4. Lama Penelitian : 6 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp 4.917.500,-

Mengetahui:
Kepala UPBJJ-UT Kendari,

Drs. Tibe Hafid, M.Pd
NIP. 130 289 042

Kendari, 20 Nopember 2000
Ketua Peneliti,

Supu Saleha, SE, M.Pd
NIP. 131 693 604

Mengetahui:
Ketua Lembaga Penelitian UT,

WBP. Simanjuntak, M.Ed, Ph.D
NIP. 130 212 017

Kepala PSI UT,

Dr. Tian Belawati
NIP. 131 569 974

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kesesuaian rencana (target) dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Tani di Daerah Sulawesi Tenggara, apa sudah sesuai dengan ketentuan; menilai tingkat keberhasilan program dalam menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan; mengevaluasi kondisi dan manfaat hasil fisik pelaksanaan program; mengidentifikasi masalah dan kendala dalam pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut hasil program.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik: wawancara tidak terstruktur, pengamatan terhadap kehidupan sosial masyarakat sebanyak 100 responden, baik di lingkungan keluarga dan masyarakat serta instansi terkait, studi dokumen dilakukan pada instansi terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan analisis Domain, taksonomi dan komponensial serta analisis manfaat B/C.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan KUT bagi petani anggota KUD di Sultra belum efektif dan belum optimal. Hal ini dilihat baik dari tingkat perkembangan pendapatan para petani dari tahun ke tahun belum menunjukkan peningkatan yang berarti, dan juga dilihat dari segi pengembalian kredit tersebut masih banyak yang menunggak baik dari segi jumlah kredit maupun dari segi jumlah anggota petani masih banyak yang menunggak setiap tahunnya. Hal yang menyebabkan kendala-kendala yang dihadapi KUD maupun petani di Sultra adalah (a) kualitas SDM, (b) kemampuan organisasi dan manajemen, (c) jiwa wirausaha, (d) penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan (e) akses kemitraan.

Dari hasil penelitian disarankan agar pihak Kanwil /Kandep Depkop serta instansi terkait lainnya perlu mengambil langkah dalam upaya pengembangan SDM, baik di kalangan para pembina, pengelola, maupun para petani/anggota KUD dengan melalui pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, pemagangan maupun studi banding.

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul Pemanfaatan Kredit Usaha Tani (KUT) di Sulawesi Tenggara dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis memperoleh bantuan moril maupun materil, khususnya berupa dana penelitian dari Pusat Studi Indonesia Lembaga Penelitian Universitas Terbuka. Untuk itu melalui lembaran ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Lembaga Penelitian Universitas Terbuka, Kepala Pusat Studi Indonesia, dan Bapak Kepala UPBJJ-UT Kendari yang telah banyak memberikan petunjuk dalam rangka pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada Kakanwil Koperasi dan PPK Propinsi Sultra dan Kepala Dinaskop masing-masing Kabupaten, serta para responden dan informan sehingga turut memperlancar jalannya pengumpulan data penelitian dan penyusunan laporan penelitian ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya kepada bidang pendidikan dan pengembangan SDM.

Kendari, 20 Nopember 2000

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 7
A. Kredit Usaha Tani	7
B. Usaha Tani	11
C. Pembiayaan Usaha Tani	12
D. Produksi Usaha Tani	12
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Rancangan penelitian	17
B. Variabel Penelitian	18
C. Teknik Pengumpulan Data.....	18
D. Teknik Analisis Data	19
 BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Pelaksanaan Program KUT	21
B. Manfaat KUT pada Anggota	32
C. Keberhasilan Program KUT di Sultra	42
D. Dampak Sosial Ekonomi Program KUT	45
E. Hambatan-Hambatan Yang Masih Melintang Dalam Pelaksanaan Program KUT	47
 BAB VI. PENUTUP	
A. Simpulan	48
B. Saran/Rekomendasi	49
 DAFTAR PUSTAKA	 50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Distribusi Luas Lahan	33
2. Penggunaan Tenaga Kerja	34
3. Penggunaan Pupuk	35
4. Jumlah Penggunaan Pestisida	36
5. Penggunaan Bibit	38
6. Penggolongan Biaya Yang Dikeluarkan	40
7. Perkembangan Pendapatan dan Biaya	41
8. Realisasi Pencairan KUT	43
9. Tunggakan Dana Kredit Usaha Tani Propinsi Sulawesi Tenggara	45

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa prioritas pembangunan lima tahun keenam adalah pembangunan sektor ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dengan peningkatan sumber daya manusia.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, sektor pertanian dalam arti luas mencakup pertanian tanaman pangan dan perkebunan, perikanan serta peternakan dan kehutanan yang akan terus dikembangkan menjadi pertanian yang tangguh.

Menurut Mubyarto (1984), bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan suatu keharusan, karena sektor ini ditinjau dari berbagai segi memang merupakan sektor yang paling dominan dalam ekonomi Nasional. Hal ini cukup beralasan karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian. Hal senada oleh Banoewidjoyo (1993), mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar berada di pedesaan yaitu 60-80 % dan pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian.

Disamping itu, pemerintah sejak pertama (kemerdekaan) hingga sekarang telah melaksanakan berbagai usaha yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, dimana pemerintah telah memberikan prioritas yang cukup tinggi untuk mencapai swasembada beras.

Agar Indonesia dapat melestarikan swasembada beras yang telah dicapai sekitar tahun 1980-an, maka usaha-usaha yang dilakukan adalah perluasan areal panen atau

ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensifikasi menurut Subyarto (1984), diartikan sebagai usaha peningkatan produksi perhektar. Usaha intensifikasi menyangkut penggunaan teknologi dalam usaha tani padi, hal ini mempunyai kaitan dengan penggunaan tenaga kerja ternak menjadi kerja mesin (traktor).

Sehubungan dengan hal tersebut telah diperkenalkan sebelumnya 7 usaha dalam proses pertanian yang disebut Sapta Usaha Tani. Ketujuh hal tersebut adalah: (1) penggunaan bibit unggul, (2) pemberian pupuk, (3) perlakuan panen, (4) pengendalian hama penyakit, (5) perbaikan cara melakukan usaha tani, (6) penyediaan dan pengaturan air, (7) peralakuan pascapanen.

Intensifikasi di sektor pertanian merupakan usaha dan langkah yang tepat di dalam menjawab tantangan peningkatan produksi pertanian, guna melanjutkan usaha-usaha swasembada pangan. Namun di lain pihak para petani kita masih diperhadapkan adanya kekurangan modal. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dimaksud, pemerintah melalui program BIMAS diantaranya telah membuka:

- a. program-program, prosedur dan langkah yang diperlukan yakni Pola Dasar Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang telah disediakan fasilitas Kredit untuk membantu pelaksanaan intensifikasi padi dan palawija, bagi petani yang permodalannya lemah, guna meningkatkan pendapatannya.
- b. Dalam upaya pemberdayaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, pemerintah telah banyak melakukan pembinaan, selain berupa pelatihan/penataran melalui kerjasama instansi pemerintah (Kanwil Kop/PKM) beserta Depnaker dan perguruan tinggi dan swasta, juga telah

kredit, yang disertai dengan sistem pengawasan yang ketat dan terencana dengan melibatkan Tim dari berbagai kalangan dengan mengacu pada Tri Sukses, yakni (a) sukses penyaluran, (b) sukses penggunaannya, dan (c) sukses pengembaliannya.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa dari ke 17 skim kredit tersebut diharap dapat berhasil baik dari segi penyalurannya, penggunaannya maupun dari segi pengembaliannya. Hal ini merupakan tantangan dari pihak pemerintah Indonesia, sebab di era orde baru, hal ini telah dilakukan berbagai studi, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gazali dkk (1997) menunjukkan bahwa: (1) pemanfaatan Kredit Usaha Tani (KUT) bagi petani anggota KUD di Sulawesi Tenggara belum efektif, dan belum optimal. Hal ini dilihat baik dari tingkat pendapatan para petani dari tahun ke tahun belum berarti, juga dilihat dari segi pengembaliannya masih banyak yang menunggak setiap tahunnya. Sedangkan di era reformasi sekarang ini dana KUT tersebut tetap dikuncurkan, akan tetapi di lain pihak dalam rangka peluncurannya masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pihak pemerintah, yakni di samping sumber daya manusia yang sangat terbatas, skill dan keterampilan wirausaha serta mental yang dimiliki perlu dipikirkan lagi.

Jika kita menelaah kembali program KUT di masa Orde baru sangatlah minim dari apa yang diharapkan oleh pemerintah. Namun di era reformasi dewasa ini ternyata ide pemberian bantuan dana KUT pada masyarakat ekonomi lemah malah semakin digencarkan oleh pemerintah. Hal ini diilhami oleh sebuah pemikiran bahwa pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan hanya dapat direalisasikan dengan pemberian bantuan dana yang ditunjang dengan

berbagai kemudahan, sehingga upaya pemerintah dalam memberdayakan ekonomi rakyat diharapkan menjadi impian yang terwujud.

Dengan adanya peluncuran dana KUT tersebut di atas diharapkan pihak petani dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga produksi pertanian dapat meiningkat. Untuk menentukan berapa tambahan produksi yang dihasilkan akibat tambahan penggunaan faktor produksi tersebut digunakan fungsi produksi. Dengan fungsi produksi dapat dihitung berapa besarnya kombinasi yang optimal masukkan (input) yang digunakan untuk mendapatkan produksi yang optimum pula (Soekartawi, et, al., 1984).

Selanjutnya meningkatnya produksi seharusnya pendapatan petani juga akan meningkat. Meningkatnya produksi pertanian akan bisa meningkatkan pendapatan petani secara langsung tergantung kepada beberapa hal antara lain: (1) kenaikan produksi tersebut tidak akan mengakibatkan surplus persediaan gabah, akibatnya harga akan menjadi turun. Kalau harga gabah turun maka kenaikan produksi tersebut tidak akan dapat menaikan petani (Tim Irigasi UGM, 1986), (2) kalau persediaan gabah di pasar cukup banyak karena adanya panen raya, dan pada saat yang bersamaan petani menjual gabahnya, maka harga gabah akan cenderung turun. Akibatnya pendapatan yang akan diterima oleh petani menjadi turun, (3) tergantung dari kebijaksanaan harga.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dengan hal-hal di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan program Kredit Usaha Tani di Daerah Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan ketentuan;
2. Sejauhmana tingkat keberhasilan pelaksanaan program Kredit Usaha Tani (KUT);
3. Bagaimana pula dampak sosial ekonomi program KUT, bagi petani di Sulawesi Tenggara dan hambatan apa saja yang masih melintang dalam pelaksanaan program KUT di daerah ini.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menilai kesesuaian rencana (target) dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Tani di Daerah Sulawesi Tenggara, apa sudah sesuai dengan ketentuan;
2. Menilai tingkat keberhasilan program dalam menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi kondisi dan manfaat hasil fisik pelaksanaan program;
4. Mengidentifikasi masalah dan kendala dalam pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut hasil program;

D. Manfaat Penelitian

1. Bahan informasi bagi petani, khususnya petani di Sulawesi Tenggara dalam upaya meningkatkan pendapatan pada usaha tani padi sawah.
2. Bagi pengkaji ilmu pengetahuan dan pengembangan sumberdaya manusia dapat menjadi bahan banding dalam rangka penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan ilmu ekonomi.
3. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan menjadi dasar atau bahan banding serta bahan masukan bagi pemerintah dan perencanaan pembangunan, khususnya

peningkatan produksi padi sawah sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani.

4. Bahan yang sangat berharga bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun berbagai kebijaksanaan yang berkaitan KUT.
5. Disamping itu hasil studi ini juga menjadi bahan modifikasi untuk mekanisme pelaksanaan yang lebih bermutu jika ternyata ditemukan berbagai kelemahan di lapangan.
6. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, melalui pemanfaatan dana KUT yang mereka pergunakan, guna mengoptimalkan penggunaan lahan mereka dengan program-program/ kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan tingkat pendapatan mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit Usaha Tani

Pada dasarnya kegiatan perkreditan timbul sebagai salah satu konsekwensi dari kependudukannya manusia sebagai homoekonomikus. Manusia sebagai homoekonomikus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai kodratnya itu selalu meningkat, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan perlunya bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam ia berusaha dan untuk meningkatkan usahanya ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari Lembaga Keuangan (Bank) dalam bentuk tambahan modal inilah yang disebut kredit, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang pokok Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan tujuan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain, dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Kredit yang diberikan oleh Lembaga Kredit didasarkan oleh kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit adalah merupakan pemberian kepercayaan. Seperti dijelaskan oleh R. Tjipto Adinogroho (1976: 8) bahwa intisari dari kredit adalah kepercayaan.

Dari pendapat tersebut berarti bahwa suatu lembaga kredit akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa sipenerima kredit akan mengembalikan kredit atau pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Selain unsur kepercayaan, unsur waktu mempunyai kaitan yang erat dengan kegiatan perkreditan. Dimana waktu yang telah dimaksud adalah suatu tempo yang memisahkan antara pemberian kredit dimasa yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan oleh Kaslan A. Tohir (1983: 13) yang dimaksud dengan kredit adalah tiap-tiap perjanjian dimana jasa dan balas jasa terpisah oleh waktu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kegiatan perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Waktu.

Yaitu suatu tempo yang memisahkan antara pemberian kredit dan penerimaan kembali jumlah kredit yang diberikan dimasa yang akan datang.

3. Degree of Riks.

yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat karena adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit.

Tujuan perkreditan di negara kita tidak hanya didasarkan pada prinsip ekonomi, melainkan disesuaikan pula dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Program Kredit Usaha Tani dimulai pada tahun 1985 sebagai pengganti pola kredit BIMAS yang telah di hentikan sejak musim tanam 1985. Berdasarkan surat Direktorat Jendral Bima Usaha Koperasi nomor. 40/BUK/I/1990, Tanggal 29 Januari 1990 pengertian Kredit Usaha Tani adalah kredit modal kerja yang

diberikan kepada koperasi unit desa untuk keperluan petani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi dan palawija.

KUT adalah merupakan kredit modal kerja yang diberikan kepada KUD/kelompok tani untuk membiayai usaha tani intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

Dari pengertian tersebut ada beberapa hal penting yang terdapat dalam kegiatan Kredit Usaha Tani. Pertama yaitu adanya pihak pemberi kredit dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia. Kedua, adanya koperasi unit desa dimana koperasi tersebut peserta pelaksana kredit untuk intensifikasi padi dan palawija. Ketiga, adanya petani yang melaksanakan kegiatan intensifikasi padi dan palawija.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Kredit Usaha Tani meliputi syarat Koperasi Unit Desa/LSM dan syarat petani. Di dalam pasal 3 Pedoman Pelaksana Kredit Usaha Tani Intensifikasi padi/palawija melalui Koperasi Unit Desa/LSM yang merupakan surat keputusan bersama antara Direktorat Jendral Bina Usaha Koperasi dan Direksi Bank Rakyat Indonesia no. 39/SKB/BUK/I/1990, persyaratan Koperasi Unit Desa atau LSM peserta Kredit Usaha Tani ditetapkan sebagai berikut:

1. Koperasi Unit Desa atau LSM peserta Kredit Usaha Tani adalah Koperasi Unit Desa atau LSM yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Kantor Departemen Koperasi.
2. Koperasi Unit Desa yang bersangkutan minimal termasuk dalam klasifikasi kelas B (mantap).
3. Koperasi Unit Desa tersebut adalah memenuhi syarat 2 sehat koperasi, yaitu sehat organisasi dan sehat usaha.
4. Koperasi Unit Desa tersebut telah berpengalaman di bidang perkreditan.

Sedangkan persyaratan bagi petani peserta Kredit Usaha Tani adalah :

1. Calon peserta Kredit Usaha Tani harus benar-benar petani yang berdomisili di lokasi Koperasi Unit Desa yang bersangkutan dan merupakan anggota Kelompok tani peserata intensifikasi padi/palawija.
2. Petani peserta berumur 18 tahun keatas.
3. Maksimum lahan yang dimiliki/digarap seluas 2 hektar.
4. Bersedia mengikuti petunjuk Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL).
5. Usaha Tani layak diberi Kredit.

Menurut petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Tani untuk intensifikasi padi/palawija melalui KUD, prosedur pemberian kredit usaha tani adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Petani

1. perencanaan Kredit.

Kebutuhan kredit bagi petani untuk intensifikasi padi dan palawija didasarkan atas pengajuan kelompok tani yang dituangkan dalam rencana yang memuat pesanan kelompok tani terhadap sarana produksi pertanian dan biaya lainnya.

2. RDKK diajukan oleh ketua kelompok tani kepada Koperasi Unit Desa atau LSM 1 bulan sebelum musim tanam dimulai.
3. Pencairan kredit dapat direalisasikan dengan jadwal yang telah disepakati antara pengurus Koperasi atau LSM dengan petani.

b. Tingkat Koperasi Unit Desa atau LSM

1. Mengajukan surat Permohonan Kredit kepada Bank umum pelaksana.
2. Penandatanganan akad kredit, dilakukan oleh

pengurus Koperasi atau LSM dengan Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi atau LSM.

3. Pencairan kredit dilakukan oleh pengurus koperasi langsung kepada Bank yang telah ditunjuk.

B. Usaha Tani.

Usaha tani adalah suatu kegiatan produksi yang bergerak dibidang pertanian. Menurut Mubyarto (1984: 57) usaha tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat ditempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tumbuhan, tanah dan air.

Uraian di atas mengandung pengertian bahwa usaha pertanian akan berlangsung bila mana terdapat proses penggabungan terutama sumberdaya alam ataupun yang bukan merupakan sumberdaya alam termasuk tenaga manusia.

Modal kerja petani dalam membiayai usaha tani intensifikasi padi/palawija, dan hortikultura yaitu pisang, nenas, pepaya, markisa, jeruk, salah, cabe merah, bawang merah, kentang dan jahe.

Tanaman padi sawah adalah salah satu jenis tanaman yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan telah menjadi kebiasaan sehingga Mubyarto (1984: 63) menjelaskan bahwa tanaman padi sawah adalah tergolong usaha pertanian rakyat yang dalam teori ekonomi pertanian dikenal dengan istilah pertanian keluarga, dimana didalamnya adalah bahan makanan terutama beras (padi).

C. Pembiayaan Usaha Petani.

Seperti diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan produksi mempunyai pengaruh terhadap jumlah pendapatan yang akan diterima.. Demikian pula untuk produksi usaha tani. Oleh karena itu pengetahuan

tentang pembiayaan usaha tani sangat diperlukan bagi petani.

Diketahui (Anwas Adiwilaga, 1975) bahwa menurut sifat dan macamnya, biaya usaha tani digolongkan sebagai berikut:

1. Biaya Tetap yaitu biaya yang sifatnya dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi seperti pajak dan bunag pinjaman
2. Biaya Variabel yaitu biaya yang sifatnya di pengaruhi oleh besar kecilnya produksi seperti biaya pembelian pupuk, obat dan bibit.
3. Biaya Langsung yaitu biaya yang langsung digunakan dalam proses produksi seperti biaya tenaga kerja.
4. Biaya tidak langsung Yaitu biaya yang tidak digunakan secara langsung dalam proses produksi.
5. Biaya marginal yaitu biaya yang diperlukan untuk satu satuan produk.
6. Biaya total yaitu jumlah biaya tetap dan jumlah biaya variabel.

D. Produksi Usaha Tani.

Berusaha tani sebagai kegiatan produksi, juga mengacu pada asas-asas produksi dimana didalam teori, landasan tehnis dalam produksi disebut fungsi produksi. Sebagaimana dijelaskan oleh Budiono (1982: 60) bahwa setiap proses produksi mempunyai landasan tehnis yang dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan hubungan tehnis antara jumlah faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi dengan jumlah output yang dihasilkan.

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah produksi yang dihasilkan dalam proses produksi akan tergantung dari kuantitas dan kualitas

faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

Faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi biasanya dibagi dalam dua jenis yaitu faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap yaitu faktor produksi yang sifatnya tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Sedangkan faktor produksi variabel adalah yaitu faktor produksi yang sifatnya habis dipakai dalam satu proses produksi.

Setiap orang dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhannya harus berusaha untuk meningkatkan pendapatannya guna memperbaiki taraf hidupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan sesuatu atau melaksanakan kegiatan yang nantinya bisa menunjang usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya, atau dengan kata lain pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Kegiatan menciptakan barang atau benda guna pemenuhan kebutuhan manusia tersebut membutuhkan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, skil dan teknologi yang kemudian dilakukan proses produksi yang digunakan menjadi output (hasil).

Pengertian produksi menurut Sukanto Rekschadiprojo dan Inriyo Giro Sudarmo yaitu: Produksi adalah merupakan penciptaan atau penambahan faedah bentuk, waktu dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia (1984: 1).

Sedangkan pengertian lain menurut Winardi bahwa: "Produksi adalah merupakan suatu usaha untuk mengkombinasikan berbagai faktor produksi (input) dalam tingkat teknologi tertentu untuk menghasilkan sejumlah produksi (output) tertentu seefisien mungkin dengan maksud menciptakan faedah-faedah untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri" (1982, 9-10). Kemudian pengertian lain menurut kamus istilah Manajemen bahwa produksi

adalah proses atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi (Panitia Istilah Manajemen, 1983: 207). Uraian di atas mengandung pengertian bahwa produksi merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi guna memperoleh hasil akhir .

Berdasarkan pada beberapa uraian di atas yang menyangkut pengertian produksi, maka kita dapat jabarkan dalam suatu konsep yang sangat sederhana bahwa pada dasarnya input (masukkan) yang satu dengan input yang lainnya mempunyai kesamaan dalam menghasilkan output yang diharapkan karena produksi yang dihasilkan tersebut merupakan kombinasi dari beberapa faktor produksi itu sendiri sehingga dengan demikian dalam usaha peningkatan produksi yang dilakukan oleh setiap orang itu dapat memperbaiki/menunjang kehidupannya.

Dalam pelaksanaan produksi, satu hal yang kita perhatikan pada proses terjadinya kombinasi antara berbagai output untuk menghasilkan suatu jenis barang adalah menyangkut penggunaan faktor-faktor produksi yang secara sederhana dapat dilihat pada fungsi produksi. Dalam bentuk matematika sederhana fungsi produksi ini dituliskan sebagai berikut :

$$Y = F (X_1 , X_2 \dots \dots X_n)$$

Dimana : Y = Adalah hasil produksi fisik.

X₁ , X₂X_n = Faktor-faktor produksi

(Subyarto, 1972: 58).

Persamaan di atas mengandung pengertian bahwa produksi fisik dihasilkan oleh bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus yaitu tanah, modal dan tenaga kerja untuk dapat menggambarkan fungsi produksi ini secara jelas dan menganalisa peranan masing-masing faktor

produksi maka dari sejumlah faktor-faktor produksi itu salah satu diantaranya kita anggap sebagai variabel (berubah-ubah), sedangkan faktor-faktor produksi lainnya dianggap konstan sebagai contoh, untuk menganalisa hubungan antara produksi bawang dengan luas tanah maka kita dapat mengasumsikan bahwa modal dan tenaga kerja sebagai faktor produksi tetap.

Fungsi produksi menurut Mubyarto adalah "suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara hasil produksi fisik (output) dengan faktor-faktor produksi (input)" (1972: 58)

Berdasarkan pengertian di atas maka jelaslah bahwa output dihasilkan oleh penggunaan dari beberapa faktor produksi.

Sehubungan dengan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka usaha peningkatan produksi bawang merah di Kelurahan Lemo perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak sehingga penggunaan dan bekerjanya faktor-faktor produksi secara utuh dan bersamaan lebih nampak yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi tanaman bawang tersebut. Karena pada kenyataannya faktor produksi modal dan skil belum begitu berperan dalam usaha peningkatan produksi bawang merah ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki para petani, serta cara pengolahannya yang masih tradisional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Tenggara, masing-masing di kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Kendari, kabupaten Kolaka dan Kotamadia Kendari. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan survey, yakni untuk mengumpulkan informasi yang sebanyak mungkin tentang variabel yang akan diteliti. Pendekatan atau metode survey adalah penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual tentang institusi sosial budaya, pendidikan, ekonomi atau politik dari kelompok masyarakat di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan dalam skop yang agak luas dan memerlukan data lapangan yang akurat. Oleh sebab itu pendekatan survey merupakan metode yang tepat.

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan fenomena sosial secara detail di lapangan dan berusaha mengamati secara saksama melalui *participan observation*, sehingga dapat pula disebut penelitian yang bersifat *observational cases studies*.

B. Variabel Penelitian

Adapun variabel yang diteliti adalah:

1. Bidang Pelaksanaan Program

- Sistem penyaluran bantuan
- Sistem penentuan kelompok sasaran
- Jumlah bantuan yang diterima
- Kondisi penentuan yang diterima
- Pemanfaatan bantuan program
- Mekanisme pengembalian bantuan

2. Dampak Program:

- Dampak terhadap aktivitas kelompok tani/nelayan
- Dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat
- Dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik: (1) wawancara tidak terstruktur, yaitu penelitian tidak membuat daftar pertanyaan yang bersifat tertutup, tetapi hanya membuat pokok-pokok pertanyaan yang menjadi pedoman wawancara yang dapat dikembangkan di lapangan sesuai dengan perkembangan data informan atau dari obyek lain, (2) pengamatan terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik di lingkungan keluarga dan masyarakat serta instansi terkait. Teknik pengamatan ini dilakukan sampai pada

taraf partisipan dimana peneliti berusaha melebur dengan kehidupan subjek, (3) Studi dokumen dilakukan pada instansi terkait, khususnya dokumen yang ada pada Desa, Kecamatan dan data pada instansi terkait seperti: Bappeda tingkat I maupun tingkat II serta tingkat kecamatan, kantor statistik tingkat I dan II maupun tingkat kecamatan, aparat kecamatan dan aparat desa, serta warga masyarakat, guna memperoleh data tentang: (a) Untuk mengetahui berapa besar jumlah KUT yang telah disalurkan di Sulawesi Tenggara, (b) Untuk mengetahui bagaimana realisasi penyaluran dana KUT tersebut, (c) Untuk mengetahui bagaimana manfaat (penggunaan) dana KUT yang diperoleh bagi para petani, (d) Untuk mengetahui bagaimana sistem dan realisasi pengembalian dana KUT di Sulawesi Tenggara.

Untuk mendapatkan data yang akurat, dilakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi (metode, peneliti dan sumber data) analisis kasus negatif, dan pengecekan anggota.

D. Teknik Analisis data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan dibagi atas dua tahapan analisis yaitu selama pengumpulan data dan sesudah data terkumpul. Pada tahap awal berlangsung secara simultan dengan kegiatan pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan: (a) pengecekan kelengkapan dan kebenaran data, (b) pengkodean data, yaitu dilakukan dengan membuat tabel perekaman data untuk

selanjutnya diberi kode data, dan (c) pengelompokan data, yaitu dikelompokkan atas dasar sumber dan teknik pengumpulan datanya sekaligus penyederhaan data.

Pada tahap kedua setelah data terkumpul semua selanjutnya dilakukan seperti yang ditawarkan oleh Spradley (1980) yaitu analisis Domain, taksonomi dan komponensial.

Data yang telah dianalisis barulah diinterpretasikan untuk selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan penelitian yang bersifat deskriptif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pelaksanaan Program KUT di Sulawesi Tenggara

1. Sistem Penyaluran Dana Bantuan KUT

Ada beberapa macam persyaratan KUD pelaksana penyalur KUT:

- a. KUD peserta adalah KUD-KUD yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten Kota berdasarkan atas performansi KUD, kemampuan potensi dan performansi KUT-nya yakni:
 - Berbadan hukum
 - Memiliki pengurus yang aktif
 - mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - organisasi dan usahanya dinilai sehat
 - Berpengalaman dalam bidang perkreditan
 - KUD mempunyai pengurus dan manajer yang mampu mengelola dan mengamankan kredit.
- b. KUD yang tidak mempunyai sisa KUT untuk komoditas padi/palawija untuk dua MT sebelumnya tidak lebih dari 20%. Sedangkan untuk MT-MT sebelumnya telah lunas dan untuk komoditas Hortikultura KUT tahun Anggaran sebelumnya telah lunas.
- c. KUD pelaksana penyalur KUT Hortikultura mempunyai jaminan pasar dalam bentuk kerjasama usaha dengan perusahaan/distributor/pabrikan atau perorangan yang termuat dalam perjanjian kerjasama.

2. Bentuk KUT melalui KUD

Bentuk kredit adalah rekeningkoran tanpa bunga berbunga. Jumlah kredit untuk setiap KUD ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Areal intensifikasi yang memerlukan KUT yang terutang dalam RDKK di wilayah KUD yang bersangkutan.
- b. Kebutuhan nyata dengan pengertian petani tidak harus mengambil seluruh kredit sesuai pedoman kebutuhan indifikatif kredit perhektar yang ditetapkan.

Kredit diberikan dalam bentuk tunai dengan pengertian dapat berbentuk cash atau menggunakan giro bilyet. Besarnya suku bunga kredit dari Bank pemberi kredit kepada KUD dan KUD kepada petani ditetapkan 14% setahun. Dalam suku bunga kredit tersebut sudah termasuk fee KUD sebesar 5%. Sedangkan fee untuk KUD yang akan diterima dikaitkan dengan realisasi pembayaran bunga dan pokok KUT.

Untuk menumbuh kembangkan minat menabung selain berkewajiban membayar bunga sesuai ketentuan yang selama ini berlaku. Kelompok tani juga diwajibkan untuk menabung sebesar 8% dari pinjaman per tahun. Tabungan tersebut disetorkan oleh KUD kepada Bank pemberi kredit dan dibukukan dalam rekening tabungan kelompok tani serta mendapat bunga menurut suku bunga tabungan yang berlaku pada Bank. Tabungan dimaksud sepenuhnya menjadi hak dari kelompok tani. Setelah diperhitungkan dengan tunggakan kredit mulai MT 1995/1996 dan seterusnya (apabila ada) seluruh sisa tabungan tersebut dikembalikan oleh KUD kepada kelompok tani sesudah 4 bulan kredit yang diterima

oleh kelompok tani jatuh tempo.

Fee KUD dibayarkan dengan tata cara sebagai berikut:

(a) bagi KUD yang telah melunasi pinjaman tepat waktu atau sebelum jatuh tempo (pelunasannya) maka fee KUD dibayar penuh pada waktu pelunasannya, (b) bagi KUD yang masih mempunyai sisa kredit/tingakan pada saat jatuh tempo diatur sebagai berikut: (1) pada saat jatuh tempo dibayarkan secara proporsional sebagai berikut:

- $$\frac{\text{(pokok + bunga) yang riil dibayar KUD}}{\text{(Pokok + bunga yang seharusnya dibayar KUD)}} \times \text{Fee KUD yang riil dibayar}$$
- Sisanya dibayarkan setelah KUD melunasi tunggakan pokok dan bunga

Pemanfaatan fee yang diterima oleh KUD tidak diperkenankan diberikan kepada pihak lain diluar KUD.

3. Persyaratan Petani Peserta KUT

1. Calon peserta KUT adalah petani yang menjadi anggota KUD berdomisili di lokasi KUD yang bersangkutan dan merupakan anggota kelompok tani peserta insus padi, palawija dan hortikultura yang menggarap sendiri lahanya atau menggarap lahan orang lain yang diberi kuasa oleh pemilik lahan yang diketahui oleh kepala desa/Ketua Satpel Bimas Desa dan Ketua kelompok tani. Bagi petani yang mempunyai lahan di wilayah KUD lain. dapat dilayani KUT oleh KUD dimana lahan itu berada dengan syarat membawa:

- a. Surat keterangan dari KUD mengenai keanggotaan dan belum memperoleh KUT untuk lahan yang bersangkutan.
- b. Surat keterangan kepala Desa mengenai domisili petani yang bersangkutan

2. Petani peserta berumur lebih 18 tahun atau sudah menikah.
3. Maksimum lahan yang dimiliki 2 hektar.
4. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan PPL dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KUT.
5. Usaha taninya layak diberikan kredit sehingga petani dapat melaksanakan Sapta usaha intensifikasi dengan baik dan hasilnya dapat meningkatkan pendapatan dan mampu mengembalikan kredit.
6. Bagi petani yang pernah memperoleh KUT maka KUT yang diperoleh 1 MT sebelumnya telah dikembalikan minimal 60% dan KUT MT-MT sebelumnya harus lunas.
7. Petani yang jelas menyalahgunakan kredit, atau lahannya selalu mengalami banjir, kekeringan dan selalu merugi tidak diperkenankan memperoleh kredit.
8. Bagi petani yang mengolah usahatannya dengan pola rotasi antara padi-padi atau palawija dalam satu musim tanam sesuai dengan penetapan Satpel Bimas Kabupaten/Kota setempat, maka KUT untuk padi tanaman kedua atau palawija dapat diberikan setelah KUT padi tanam pertama dibayar kembali minimum 60%.
9. Bagi petani yang mengolah usaha taninya dengan pola tumpang gilir antara jagung dan kedele sesuai dengan penetapan satpel Bimas Kabupaten/Kota setempat, dapat diberikan KUT untuk tanaman palawija kedua setelah yang pertama dibayar kembali minimum 60%.
10. Bagi petani peserta KUT yang tanamannya rusak karena bencana alam dimungkinkan untuk diberikan keringanan berupa penjadwalan kembali atau tambahan kredit yang

pengajuannya diatur secara kasus per kasus sebagai berikut:

a. Pengajuan didasarkan atas berita acara sebagaimana yang diatur dalam surat BP Bimas No. BM-530-661 tanggal 14 Maret 1988.

b. Bilamana berdasarkan berita acara:

- Hasilnya hanya mencapai antara 0% s/d 15% dari produksi normal dimungkinkan untuk dijadwalkan kembali 2 (dua) MT.

- Hasilnya hanya mencapai di atas 15% sampai dengan 50% dari produksi normal dimungkinkan untuk dijadwalkan kembali 1 (satu) MT.

11. Jaminan KUT adalah hasil produksi padi, Palawija dan Hortikultura yang dibiayai kredit dan apabila diperlukan KUD dapat meminta jaminan tambahan.

4. Prosedur Memperoleh KUT Ditingkat Petani

a. Perencanaan kredit

Kebutuhan kredit bagi petani untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura di dasarkan atas pengajuan kelompok tani dituangkan dalam RDKK yang disusun atas dasar musyawarah kelompok tani. Tembusan RDKK disampauikan kepda kepala Desa/kelurahan.

b. Pengajuan Kredit

- RDKK diajukan oleh ketua kelompok tani kepada KUD paling lambat 1 bulan sebelum MT dimulai.

- Dalam hal petani pemohon krdit berstatus petani penggarap, maka permohonan kreditnya harus dilengkapi surat kuasa garapan dari pemilik dengan

menggunakan formulir lampiran 1.

- Akad kredit/penandatanganan perjanjian kredit dilakukan oleh petani/kelompok tani (mewakili anggota) dengan KUD dengan menggunakan formulir lampiran 2.

c. Pencairan Kredit

- kredit dapat direalisasikan di unit Simpan Pinjam KUD sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara pengurus KUD dengan petani/ketua kelompok tani.
- kredit dapat dicairkan oleh petani/kelompok tani dalam bentuk sarana produksi (pupuk) dan dalam bentuk tunai/cash (komponen biaya lainnya).
- apabila penyaluran KUD dalam bentuk natura (pupuk, pestisida) dapat dilakukan ditempat pelayanan Koperasi (TPK) yaitu dengan cara KUD mengeluarkan Surat Perintah penyerahan barang (SPFB) kepada petani untuk ditukarkan di TPK yang terdekat.
- pencairan kredit dilakukan oleh petani yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan. Apabila pencairan kreditnya tidak dapat dilakukan sendiri, maka cairannya dapat dikuasakan oleh petani kepada ketua kelompok tani dengan menggunakan formulir lampiran 3.

d. Pengembalian Kredit

- dua minggu sebelum panen kelompok tani harus menyusun rencana pengembalian kredit (RPK) yang disampaikan kepada KUD dan Kepala Desa.
- Pengembalian kredit dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan natura selama 12 bulan atau 1 tahun sejak

akad kredit ditandatangani dan dilunasi paling lama 4 bulan setelah jatuh tempo.

- Untuk kelancaran pengembalian kredit, maka pengurus KUD dan ketua kelompok tani secara bersama-sama mendorong dana menggerakkan para petani/kelompok tani untuk mengembalikan kreditnya sesuai dengan petunjuk Direktur Jenderal Bina usaha Koperasi No. 67/BUK/II/1989 tanggal 14 Februari 1989 perihal peningkatan pengembalian KUT untuk Intensifikasi padi dan palawija.
- Bagi petani yang melunasi KUT sebelum jatuh tempo (pelunasan maju) atau tepat waktu 2 minggu setelah panen) dapat diberikan insentif yang besarnya ditentukan berdasarkan musyawarah antara petani/kelompok tani dengan KUD.

5. Prosedur Memperoleh Kredit ditingkat KUD

a. Perencanaan Kredit

- Kebutuhan kredit masing-masing KUD didasarkan atas RDKK untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura yang disusun oleh kelompok tani secara musyawarah dengan menggunakan formulir lampiran 4 dengan tembusan kepada kepala Desa/Kepala keluraha.
- RDKK yang diajukan oleh kelompok tani adalah sekaligus merupakan pendaftaran/permohonan kredit dari petani/kelompok tani kepada KUD dan merupakan dasar penyusunan kebutuhan kredit bagi KUD.
- Berdasarkan RDKK yang masuk dari kelompok Tani, KUD menyeleksi terhadap calon peserta KUT yang dibantu oleh tenaga teknis Bank memberi kredit di KUD

berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

- Dua minggu sebelum musim tanam dimulai rekapitulasi RDKK sudah disampaikan kepada Bank pemberi kredit untuk diproses lebih lanjut.

b. Pengajuan Kredit dari KUD kepada Bank Pemberi Kredit

Surat permohonan kredit diajukan oleh KUD secara langsung kepada Bank pemberi kredit dan mengisi model 72/Kop yang dilampiri dengan:

- Copy ketikan berita acara rapat anggota yang sekaligus sebagai surat kuasa anggota kepada pengurus untuk mengajukan kredit.
- Daftar rekapitulasi Rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan menggunakan formulir seperti lampiran 5.
- Rencana pemberian dan pengembalian kredit (RPP) dengan menggunakan formulir seperti lampiran 6 model 72/kop tidak perlu mendapat rekomendasi Kakandepkop dan PPK.

c. Penandatanganan akad Kredit (Co)

- Akad kredit KUD dilakukan oleh pengurus KUD (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dengan pemimpin cabang bank pemberi kredit setempat dan dilegalisir oleh Kakandepkop dan PPK kabupaten/kota.
- Di wilayah KUD yang MT-nya berbeda dimungkinkan dilaksanakannya penandatanganan CO maksimum 2 kali sepanjang masih dalam batas waktu penandatanganan CO.

d. Pencairan Kredit

- Pencairan kredit dilakukan oleh pengurus KUD langsung ada bank pemberi kredit sesuai dengan

rencana penarikan kreditnya. Apabila terjadi perubahan rencana penarikan kredit mereka pengurus KUD harus segera menyampaikan perubahan rencana penarikan kredit tersebut kepada Kanca Bank pemberi kredit.

- Pencairan KUT oleh KUD dapat dilaksanakan dalam 2 tahap: (a) merealisasikan kebutuhan pupuk senilai yang tertera pada RDK, bank pemberi kredit melakukan pemindahan bukuan (over booking) dari rekening KUD ke rekening PT. Pusri, sehingga KUD hanya menerima DO senilai pupuk yang dibutuhkan dan selanjutnya KUD ke gudang PT. Pusri untuk mengambil pupuknya, (b) Tahap kedua bank pemberi kredit mencairkan komponen biaya lainnya dalam bentuk tunai/cash kepada KUD senilai kebutuhan yang tercantum dalam RDKK.
- Kredit yang telah dicairkan oleh KUD segera diteruskan kepada petani pemohon.

e. Penggunaan kredit

KUT untuk intensifikasi padi, palawidja dan hortikultura hanya dapat digunakan untuk modal kerja guna meningkatkan produktivitas usaha tani dalam rangka pelaksanaan program peningkatan produksi tanaman padi, palawija dan hortikultura melalui program intensifikasi.

f. Pengembalian kredit dari KUD ke Bank pemberi kredit:

- Jangka waktu kredit ditetapkan maksimum 12 bulan dihitung dari sejak awal musim tanam sehingga kredit harus lunas pada akhir Maret tahun berikutnya, untuk musim tanam April-September dan akhir September tahun

berikutnya untuk musim tanam Oktober-Maret.

- Apabila kredit yang dicairkan KUD dari bank pemberi kredit tidak direalisasikan Petani pemohon, maka KUD harus segera mengembalikan kredit tersebut kepada Kanca Bank pemberi kredit setempat.
- KUD segera (paling lambat 1 hari) sudah menyetorkan penerimaan setoran kredit dari petani ke kanca bank pemberi kredit atau melalui bank pemberi kredit unit Desa, tanpa menunggu saat jatuh tempo. Petugas penagih KUD diwajibkan menyetor hasil tagihannya ke KUD pada hari yang sama dan tidak diperkenankan untuk dibawah pulang ke rumah. Oleh karena itu bendahara KUD setiap hari setelah jam kerja harus meneliti keadaan Kas KUD, khususnya terhadap penerimaan setoran KUD.
- Apabila kredit kepada petani telah jatuh tempo dan ternyata petani/kelompok tani belum dapat melunasi kreditnya maka penyelesaiannya diatur melalui alternatif sebagai berikut:
 - a. Pengurus KUD bersama Ketua kelompok tani meminta kepada petani hasil produksi padi, palawija dan hortikultura yang dibiayai dengan kredit tersebut untuk dijual kepada KUD/pasaran umum yang hasilnya dimanfaatkan untuk melunasi kreditnya.
 - b. Apabila ternyata hasil penjualan padi, palawija dan hortikultura belum cukup menutupi tunggakan dan atau yang bersangkutan tidak lagi memiliki padi, palawija dan hortikultura hasil produksinya yang dibiayai dengan kredit tersebut, maka

pengurus KUD dan ketua kelompok tani dapat menjual jaminan dari petani yang bersangkutan guna menutup kekurangan pelunasan kredit dimaksud dan sisanya dikembalikan kepada petani yang bersangkutan.

c. Tunggakan petani tersebut diselesaikan secara tanggung renteng oleh kelompok tani yang bersangkutan.

- Mekanisme pengembalian kredit KUT di Sultra yaitu dimana 2 minggu sebelum panen kelompok tani harus menyusun rencana pengembalian kredit (RPK) yang disampaikan kepada KUD dan kepala desa. Pengembalian kredit dapat dilakukan dalam bentuk tunai selama satu tahun sejak akad kredit ditandatangani dan paling lambat dilunasi empat bulan setelah jatuh tempo.
- Untuk kelancaran pengembaliannya, maka pengurus KUD dan ketua kelompok tani secara bersama-sama mendorong dan menggerakkan para petani atau kelompok tani untuk mengembalikan kreditnya.
- Bagi petani yang melunasi KUT sebelum jatuh tempo atau tepat waktu dapat diberikan insentif yang besarnya ditentukan berdasarkan musyawarah antara petani/kelompok tani dengan KUD.
- Berbicara masalah realisasi pengembalian kredit tersebut hampir disamakan dengan bentuk bantuan bagi para petani.

B. Manfaat Kredit Usaha Tani (KUT) Pada Anggota.

1. Faktor Produksi Usaha Tani

Di dalam setiap pengelolaan unit usaha tani dibutuhkan ketersediaan faktor-faktor produksi guna mendorong berlangsungnya proses produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor produksi yang dimaksud, meliputi: tanah, tenaga kerja dan modal. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, faktor produksi tanah diasumsikan sebagai penggunaan lahan dan atas faktor produksi modal hanya difokuskan pada sarana produksi yang digunakan, yakni terdiri dari: bibit, pupuk dan pestisida. Gambaran umum mengenai penggunaan faktor-faktor produksi dalam usaha tani pemanfaatan dana KUT di Sulawesi Tenggara, secara khusus akan diungkapkan lewat deskripsi faktor-faktor produksi yang dilibatkan dalam usaha tani milik responden sebagai berikut.

a. Penggunaan Lahan

Lahan usahatani yang dikelola oleh setiap responden umumnya berada di atas areal tanah seluas 0,5 hingga 3 Ha. Sebagian besar responden memiliki lahan usaha tani seluas 1,5 hingga 2 Ha. Selebihnya terdistribusi pada lahan usaha tani seluas 0,5 hingga 1 Ha serta 2,5 hingga tiga Ha. Untuk jelasnya, distribusi luas lahan usaha tani yang dikelola oleh para responden, dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 1. Distribusi Luas Lahan Usaha Tani yang dikelola Tahun 1999

No	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	0,50 - 1,00	27	27,00
2	1,50 - 2,00	65	65,00
3	2,50 - 3,00	8	08,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Wawancara, diolah

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa terdapat 65 responden (65 %) yang memiliki lahan seluas 1,5 hingga 2 Ha. Selebihnya, terdapat 8 responden (8 %) memiliki lahan seluas 2,5 sampai 3 Ha, dan 27 responden (27 %) lainnya memiliki lahan seluas 0,5 hingga 1 Ha. Gambaran kuantitatif tersebut mengindikasikan penggunaan lahan relatif cukup luas dilihat dari ukuran unit usaha tani yang dikelola setiap responden.

2. Penggunaan Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dilibatkan dalam pengelolaan usaha tani di daerah pedesaan, sebagaimana yang juga dapat ditemui pada beberapa usaha tani pada subyek penelitian ini, tidak seluruhnya merupakan tenaga kerja, yang secara ekonomis menuntut penambahan biaya produksi. Sebagian di antara tenaga kerja tersebut berasal dari anggota keluarga atau karib-kerabat petani yang bertindak sebagai pengelolah, yang karenanya tidak diberi upah dalam bentuk uang tunai. Meskipun demikian dalam penelitian ini,

penggunaan tenaga kerja senantiasa diasumsikan sebagai tenaga kerja upahan yang mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani/responden. Jelasnya, gambaran kuantitatif mengenai penggunaan tenaga kerja dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Penggunaan Tenaga Kerja Yang Dikelola Responden Tahun 1999

No	Penggunaan Tenaga Kerja (HKp)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	20 - 39	11	11,00
2	40 - 49	31	31,00
3	50 - 60	58	58,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Wawancara, diolah

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa unit usaha tani yang dikelola oleh 58 responden (58 %) menyerap tenaga kerja sebanyak 50 hingga 60 HKp, 31 responden (31 %) menyerap tenaga kerja 40 sampai 49 HKp, dan 11 (11 %) responden lainnya hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 20 hingga 39 HKp. Persentase penyerapan tenaga kerja pada usaha tani yang dikelola oleh 11 responden tersebut, cenderung berada dibawah standar rata-rata penggunaan tenaga kerja yang diserap pada usaha tani yang dikelola oleh responden lainnya.

3. Penggunaan Pupuk

Jenis pupuk yang biasa dipergunakan oleh para

responden dalam mengelola usaha tani adalah pupuk buatan yang terdiri dari : Urea, TSP dan KCL, serta pupuk organik berupa kompos. Adapun jumlah penggunaan pupuk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Penggunaan Pupuk Yang Dikelola Responden Tahun 1999

No	Penggunaan Pupuk (Kg)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	150 - 400	56	56,00
2	401 - 700	34	34,00
3	701 - 1000	10	10,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Wawancara, diolah

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah pupuk yang diaplikasikan responden umumnya berkisar antara 150 hingga 400 kg, sedangkan yang usaha tani yang dikelola responden lainnya hanya menggunakan pupuk sebanyak 750 Kg, hingga 1.000 kg (1 ton) serta 450 hingga 700 Kg. Dengan demikian terdapat 10 responden yang menggunakan pupuk dibawah rata-rata jumlah penggunaan pupuk yang diaplikasikan pada usaha tani yang dikelola oleh responden lainnya.

4. Penggunaan Pestisida

Secara umum, pestisida yang biasa diaplikasikan pada usaha tani tertentu dapat berupa gas, cairan ataupun tepung (bubuk). Di Sulawesi Tenggara para responden yang

mengelola usaha tani umumnya menggunakan pestisida dalam bentuk cairan. Jenis cairan pestisida yang digunakan ditentukan oleh jenis hama dan penyakit yang menyerang areal pertanian. Dengan mengabaikan jenis pestisida yang digunakan, maka gambaran kuantitatif tentang jumlah pestisida yang diaplikasikan yang dikelola oleh para responden, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Jumlah Penggunaan Pestisida Pada Petani Yang dikelola Responden, 1999

No	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	1 - 2	6	6,00
2	3 - 4	38	38,00
3	5 - 6	42	42,00
4	7 - 8	8	8,00
5	9 - 10	6	6,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Wawancara, diolah

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa jumlah penggunaan pestisida pada masing-masing unit usahatani pada sayur-sayuran yang dikelola oleh 42 responden (42 %) berkisar antara 5 hingga 6 liter. 38 responden (38 %) masing-masing menggunakan pestisida sebanyak 3 sampai 4 liter, 8 responden (8 %) masing-masing menggunakan pestisida sebanyak 7 sampai 8 liter, 6 responden (6 %) masing-masing menggunakan pestisida 9 hingga 10 liter, dan 6 responden (6 %) lainnya masing-masing hanya menggunakan pestisida sebanyak 1 sampai 2 liter.

5. Penggunaan Bibit

Bibit merupakan salah satu sarana produksi yang secara langsung dapat mempengaruhi tinggi rendahnya volume produksi yang dihasilkan. Penggunaan bibit yang buruk dapat menurunkan produksi secara drastis. Demikian pula sebaliknya, pemilihan bibit yang tetap dapat secara linier meningkatkan volume produksi yang dihasilkan.

Pada usaha tani dalam objek penelitian ini, pemilihan jenis bibit disesuaikan dengan jenis tanaman yang hendak di produksi. Jenis-jenis bibit yang dipergunakan tersebut, umumnya diperoleh dari hasil persemaian sendiri, namun sebagian petani lainnya memilih membeli bibit dari toko-toko pertanian yang ada di daerah ini. Petani yang memilih untuk membeli bibit dari toko, didorong oleh pertimbangan bahwa bibit yang dijual di toko-toko umumnya memiliki tingkat sterilitas (kemurnian) dan vigor (daya tumbuh) yang lebih terjamin dan lebih tinggi dibandingkan dengan sterilitas serta virgo bibit yang diperoleh dari hasil persemaian sendiri di lapangan.

Terlepas dari jenis dan sumber pengadaannya, jumlah bibit yang digunakan oleh para responden pada usaha tani yang diusahakannya, dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Penggunaan Bibit Yang Dikelola Responden Tahun 1999

No	Penggunaan Bibit (Kg)	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	8 - 19	79	79,00
2	20 - 29	20	20,00
3	30 - 39	1	1,00
Jumlah		100	100,00

Sumber: Hasil Wawancara, diolah

Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa jumlah penggunaan bibit pada masing-masing unit usaha tani sayur-sayuran yang dikelola oleh 79 responden (79 %) berkisar antara 8 hingga 19 Kg. 20 responden (20 %) masing-masing menggunakan bibit dibawah jumlah rata-rata penggunaan bibit pada usaha tani lainnya, hanya sebanyak 20 sampai 29 kg, sedangkan 1 responden lainnya (1%) justru menggunakan bibit di atas jumlah rata-rata penggunaan bibit pada usaha tani lainnya, yakni sebanyak 30 hingga 39 Kg.

Perbedaan jumlah penggunaan bibit tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan perbedaan jenis tanaman serta luas lahan usahatani yang diusahakan oleh masing-masing responden.

2. Keuntungan Ekonomi Petani Dalam Pemanfaatan KUT

Kredit Usaha tani adalah modal kerja yang diberikan kepada KUD/Kelompok tani untuk membiayai usaha tani intensifikasi padi, palawija dan hortikultura, dengan tujuan:

- a. Agar petani/kelompok tani dapat membiayai usaha taninya dengan menerapkan teknologi anjuran sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani yang bersangkutan.
- b. Mendidik para petani berperilaku menabung
- c. Mendorong petani untuk membentuk organisasi dalam wadah kelompok tani yang selanjutnya bergabung dalam organisasi KUD.
- d. Mendukung program intensifikasi padi/palawija dan hortikultura serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mengetahui jumlah pendapatan, maka terlebih dahulu harus diketahui pula tentang biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dimaksudkan dalam penelitian ini terdiri dari biaya tetap, biaya variabel dan biaya tenaga kerja.

Yang dimaksudkan dengan biaya produksi dalam penelitian ini adalah Biaya tetap terdiri dari: Pokok pinjaman, Bunga pinjaman, dan pajak. sedangkan biaya Variabel yaitu: pembelian pupuk, bibit dan obat-obatan; sedangkan biaya langsung terdiri dari: biaya tenaga kerja dan biaya pemeliharaan.

Adapun penggolongan biaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Penggolongan Biaya Yang Dikeluarkan Petani

No	Tahun	B. Langsung kotor (Rp)	Biaya Sarana Produksi (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	1995	50.600.000	34.540.000	85.140.000
2	1996	49.827.000	35.506.000	85.333.000
3	1997	47.684.000	36.691.000	84.375.000
4	1998	51.252.500	37.328.000	88.580.500
5	1999	53.394.000	37.670.000	91.064.000
Jumlah		252.757.500	181.735.000	434.492.500

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa jumlah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan tahun 1995 sebesar Rp 50.600.000 turun menjadi Rp 49.827.000 atau 0,98 % pada tahun 1996, tahun 1997 turun menjadi Rp 47.684.000 (0,96 %), pada tahun 1998 naik menjadi Rp 51.252.500 atau 1,07 %. Sedangkan tahun 1999 naik menjadi Rp 53.394.000 atau 1,04 %.

Dalam setiap kegiatan ekonomi di mana usaha selalu berkaitan dengan produksi selalu muncul persoalan biaya. Keberadaan biaya erat kaitannya dengan faktor produksi atau korban-korban lain yang digunakan dalam kegiatan produksi.

Adapun biaya sarana produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi petani di daerah penelitian adalah Pokok pinjaman, Bunga pinjaman, dan pajak. sedangkan biaya Variabel yaitu: pembelian pupuk, bibit dan obat-obatan.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa besarnya biaya sarana produksi yang dikeluarkan petani pada tahun

1995 sebesar Rp 34.540.000 naik menjadi Rp 35.506.000 atau 1,03 % pada tahun 1996. Pada tahun 1997 naik menjadi Rp 36.691.000 atau 1,03 %, tahun 1998 naik lagi menjadi Rp 37.328.000 atau 1,02 % sedangkan tahun 1999 naik menjadi Rp 37.670.000 atau 0,10 %.

Analisis ratio rentabilitas R/C bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha yang dilakukan menguntungkan atau tidak. Ratio Rentabilitas adalah menunjukkan kemampuan usaha untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Revenue- Cost adalah perbandingan antara besarnya nilai penerimaan dan pengeluaran dai suatu usaha. Untuk jelasnya dapat dilihat nilai R/C ratio para petani di daerah penelitian sebagai berikut:

Tabel 7. Perkembangan Pendapatan (Produksi) dan Biaya Produksi Petani.

No	Tahun	Hasil Usaha kotor (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Hasil usaha Bersih (%)
1	1995	101.200.000	85.140.000	1,19
2	1996	99.654.000	85.333.000	1,17
3	1997	95.368.000	84.375.000	1,13
4	1998	102.501.000	88.580.000	1,16
5	1999	106.788.000	91.064.000	1,17
Jumlah		505.511.000	434.492.000	1,16

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keuntungan pada tahun 1995 sebesar 1,19 % turun menjadi 0,14 % pada tahun 1996. Pada tahun 1997 turun lagi menjadi 1,12 %. Pada tahun 1998 naik menjadi 1,14 %.

Sedangkan keuntungan tahun 1999 naik menjadi 0,17 %.

Berdasarkan tabel di atas juga diperoleh informasi bahwa dari tahun 1995 hingga 1999 memberikan keuntungan rata-rata sebesar 1,16 % setahun. Atau dengan perkataan lain pendapatan para petani di daerah penelitian tidak mengalami peningkatan.

Dari tabel di atas pula dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi hasil produksi para petani semakin tinggi pula biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga tingkat pendapatannya kurang berpengaruh, sehingga untuk dapat mengembalikan pinjaman kreditnya dari Bank sangat berat. Hal ini nampak bahwa masih banyaknya tunggakan kredit, baik pada KUT maupun KPP yang diperolehnya.

Berdasarkan hasil penelitian masih ada terdapat tunggakan kredit pada saat jatuh tempo, karena harus tetap konsisten dengan perjanjian kredit dan segera dilunasi pada saat jatuh tempo. Untuk jelasnya daftar tunggakan Kredit pangan maupun KUT pada KUD di Sultra dapat dilihat pada tabel 10.

C. Keberhasilan Program KUT Dalam Meningkatkan Pendapatan

- Tingkat keberhasilan dari program KUT dalam menjangkau kelompok sasaran yang ditetapkan belum secara maksimal, hal ini disebabkan karena banyaknya kelompok sasaran yang dibimbing langsung oleh petugas PPL di wilayah kegiatannya, menunjukkan produktivitas para petani/kelompok tani tidak meningkat.
- Kurangnya perhatian petugas PPL terhadap kebun

percobaan yang mereka buat sehingga para petani/kelompok tani enggan mengambil contoh dari kebun percontohan yang dilakukan oleh petugas PPL walaupun nantinya produktivitas para petani/kelompok tani akan meningkat.

- Manfaat yang diperoleh dengan adanya program KUT yaitu akan memaksimalkan program intensifikasi pada palawija dan hortikultura di Sultra sehingga Sulawesi Tenggara dapat dikatakan sebagai daerah swasembada beras sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang ini, dan adapun tindak lanjut penanganannya akan lebih ditingkatkan lagi menjadi KKP (Kredit Ketahanan Pangan) yang akan dibahas pada tanggal 23 oktober 2000 di Kendari.

Adapun realisasi pencairan dana KUT di Propinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 1995/1996 hingga tahun 1998/1999 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Realisasi Pencairan Kredit Usaha Tani Prop. Sulawesi Tenggara 1995/1996 - 1998/1999

Kabupaten	1995/1996 (Rp000)	1996/1997 (Rp000)	1997/1998 (Rp000)	1998/1999 (Rp000)
Kendari	1.807.891	480.005	1.827.125	16.993.630
Kolaka	675.042	355.604	1.041.337	9.399.126
Buton	486.193	351.432	248.884	3.146.257
Muna	54.725	129.500	83.691	1.249.512
Total	3.023.851	1.316.541	3.201.037	30.788.525

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa yang terbesar realisasi kreditnya adalah pada tahun 1998/1999 sebanyak Rp 30.788.525.000,- menyusul tahun 1997/1998 sebanyak Rp 3.201.037.000,- kemudian tahun 1995/1996

sebanyak Rp 3.023.851,- dan tahun 1996/1997 sebanyak Rp 1.316.541,-

Pada tahun 1998/1999 yang terbesar menerima kredit adalah Kabupaten Kendari sebesar Rp 16.993.630.000 (55,19%), menyusul kabupaten Kolaka sebesar Rp 9.399.126 (30,53%), kemudian sisanya kabupaten Buton sebesar Rp 3.146.257 (10,22%) dan kabupaten Muna sebesar Rp 1.249.512 (4,09%).

Di kabupaten Kendari sejak tahun 1995 s.d 1999 sebanyak 337 Koperasi dan LSM yang mendampingi Kelompok tani/petani dalam rangka pencairan dana KUT, terdiri dari 153 buah koperasi dan LSM, di kabupaten Kolaka terdapat 104 buah Koperasi dan LSM, di kabupaten Buton 58 buah Koperasi dan LSM dan di Kabupaten Muna sebanyak 22 buah koperasi dan LSM.

Dari realisasi dana kredit tersebut hingga akhir tahun 1999 masih terdapat tunggakan yang belum lunas terbayar mencapai Rp 28.134.810.000,- dan masih terdapat 244 buah Koperasi dan LSM, sedangkan sisanya sebanyak Rp 10.372.676.000 yang sudah terbayar.

Untuk lebih jelasnya dana tunggakan kredit usaha tani hingga tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Tunggakan (Sisa) Dana KUT Propinsi Sulawesi Tenggara 1995/1996 - 1998/1999

Kabupaten	1995/1996 (Rp000)	1996/1997 (Rp000)	1997/1998 (Rp000)	1998/1999 (Rp000)
Kendari	944.892	180.700	747.977	14.075.547
Kolaka	110.348	139.400	379.128	7.771.333
Buton	26.791	22.915	394	2.580.705
Muna	-	-	22.225	1.187.451
Total	1.082.031	343.015	1.149.724	25.615.036

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 1995/1996 baru sekitar 64,22% yang sudah dikembalikan (dibayar) dan sekitar 35,78% yang masih menunggak. Pada tahun 1996/1997 baru sekitar 73,95% yang sudah terbayar sedangkan sisanya 26,05% masih menunggak. Pada tahun 1997/1998 baru sekitar 64,08% yang terbayar sedangkan sisanya sebesar 35,92% masih menunggak. Pada tahun 1998/1999 baru sekitar 16,81% yang sudah terbayar, sedangkan sisanya sekitar 83,19% masih menunggak.

D. Dampak Sosial Ekonomi Program KUT, Bagi Petani di Sultra

i. Dampak terhadap aktivitas Kelompok Tani

- aktivitas kelompok tani terkonsentrasi pada usaha tani yang sedang dikerjakan dan tidak perlu lagi memikirkan modal kerja sementara mengerjakan usaha taninya.
- Dengan adanya KUT pelayanan desa semakin maju/meningkat yang dibarengi dengan kepentingan para petani/kelompok tani dalam pengolahan usahatani sehingga dengan sendirinya aksesibilitas desa akan meningkat pula.
- Dampak terhadap lingkungan terutama penggunaan alat-alat pestisida masih dalam ambang toleransi tergantung dari serangan hama dari beberapa jenis tanaman padi, palawija dan hortikultura.
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa ada kemajuan secara bertahap yang disesuaikan dengan keadaan/kebutuhan bagi para petani/kelompok tani
- Akan terlaksananya keseragaman pola tanam baik waktu maupun jenis tanaman yang akan ditentukan melalui

- kontak tani, kelompok tani.
- Dampak terhadap peningkatan sarana dan prasarana fisik yaitu dengan KUT maka akan dibangun jalan usaha tani tersebut untuk keperluan para petani/kelompok tani agar tidak mendapat kesulitan dalam memasarkan hasil-hasil usaha taninya.
 - Pembangunan desa akan terlaksana dengan baik, lahan-lahan yang mereka garap bisa membawa hasil yang maksimal, produktivitas usaha tani meningkat sehingga pendapatan mereka pula bertambah.
 - Dari program KUT yang telah ditetapkan berdasarkan mekanisme penyaluran dana dapat membantu terdapatnya dampak-dampak program petani sehingga dalam mengantisipasi kendala-kendala yang sering terjadi masih tepat sasaran.
 - Orientasi pihak Kandep Koperasi Tingkat II adalah pemberdayaan lembaga-lembaga dalam hal ini koperasi dan LSM yang dapat membantu bertambahnya nilai produktivitas masyarakat.
 - Kebutuhan lain yang diprioritaskan adalah: peternakan, perikanan sebagai usaha yang berkesinambungan.

E. Hambatan-Hambatan Yang Masih Melintang Dalam Pelaksanaan

Koperasi dan LSM adalah lembaga-lembaga yang mempunyai hak dalam penerimaan KUT yang ditetapkan dari prosedur pembayaran melalui BRI → ke Koperasi/LSM → Kelompok Usaha Tani → Petani.

Sedangkan proses pengembalian kredit adalah dari Petani → Kelompok Tani → Koperasi/LSM → BRI. Pengajuan permohonan untuk memperoleh KUT yaitu tiga bulan sebelum jadwal tanaman.

- Realisasi penyaluran dana KUT kadang-kadang tidak sesuai dengan jadwal sehubungan pencairan dana menyangkut keadaan keuangan pusat
- Dan sampai sekarang jumlah dana yang disalurkan sebanyak 1 milyar setengah.
- Dari hasil pemantauan di lapangan bahwa realisasi dari bidang-bidang yang ada masih kurang efektif, seperti sistem penentuan kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah kelompok yang tergabung dalam koperasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemanfaatan KUT bagi petani anggota KUD di Sulawesi Tenggara belum efektif, dan belum optimal. Hal ini dilihat dari tingkat pendapatan para petani dari tahun ke tahun belum menunjukkan peningkatan yang berarti, dan juga dilihat dari segi pengembalian kredit tersebut masih banyak yang menunggak setiap tahunnya baik dilihat dari segi jumlah kredit maupun dari jumlah pengembaliannya.
2. Secara umum yang merupakan kendala-kendala yang dihadapi KUD dan para petani di Sulawesi Tenggara adalah (a) kualitas SDM, (b) kemampuan organisasi dan manajemen, (c) jiwa wiraswasta, (d) penguasaan dan pemanfaatan teknologi, dan (e) akses kemitraan.

B. Saran

1. Kanwil/Kandep Koperasi Propinsi Sulawesi Tenggara serta instansi terkait lainnya perlu mengambil langkah-langkah dalam upaya pengembangan SDM, baik di kalangan para pembina, pengelola maupun di kalangan para anggota KUD, dengan melalui pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, pemagangan maupun studi banding.
2. Terhadap masyarakat diperlukan adanya bimbingan dan penyuluhan guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KUD.

3. Para pengelola/pengurus diharapkan agar lebih meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen (jiwa dan semangat wirastasta) di kalangan KUD-KUD yang ada.
4. Para pengurus/pengelola, pembina perlu mengembangkan kemitraan usaha dengan badan usaha lain dengan prinsip saling menguntungkan, saling menghidupkan, dan saling menguatkan (baik dan segi SDM, permodalan maupun usaha).
5. Kegiatan studi banding perlu dilakukan ke KUD-KUD yang telah maju dan berkembang sehingga terjadi alih IPTEK di bidang perkoperasian.
6. Dengan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi, maka perlu membutuhkan keterlibatan instansi terkait (lintas sektoral), para birokrat, para perguruan tinggi, program LSM dipikirkan untuk dapat menciptakan suatu koperasi binaan sebagai pilot proyek yang dapat dijadikan contoh di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Chaniago, dkk. 1985. Pendidikan Perkoperasian Indonesia. Angkasa Bandung.
- Anwar Adiwilaga, 1982. Ilmu Usaha Tani, Penerbit, Alumni Bandung
- A. Soeharyo Dan Dahlah Patong, 1984. Sendi-Sendi Pokok Ilmu Usaha Tani, Lembaga Penerbit, Fakultas Pertanian Unhas, Ujung Pandang.
- A.G. Karta Soeparta, 1988. Pengantar Ekonomi Produksi Pertanian, Penerbit PT. Bima Aksara, Jakarta.
- Bahari Muhammad Akib Tuwo, Usman Rianse, 1988. Teknik Usaha Tani, Faperta, Unhalu
- Dahlan Patong, 1985. Pengantar Analisis Perubahan Tknologi Pertanian, dibawakan pada kursus/praktikum, perencanaan pertanian. Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- Dengan Koperasi menuju Demokrasi Ekonomi, 1988. Badan Peneliti dan Pengembangan Koperasi. Departemen Koperasi.
- Entang Sastraatmadja, 1984. Ekonomi Pertanian Indonesai, masalah Gagasan dan strateqi, Penerbit, aksara Bandung.
- IKPN-RI, 1991. Organisasi dan Usaha Koperasi. Jakarta.
- Kartasapoetra, G. Koperasi Indonesia
- Kartasapoetra, G. Praktek Pengelolaan Koperasi.
- Ninik Widiyanti, 1988. Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto, Cara Mendirikan dan mengelola Koperasi di Indonesia.
- Redaksi Rineka Cipta, Pengembangan dan Pembinaan Koperasi-KUD.
- Riyanto, Bambang, 1982. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi kedua, Yayasan Badan Penerbitan Gajah Mada, Yogyakarta.
- Richard G. Lipsey, Pengantar Ilmu Ekonomi (Jilid 3)
- UU-RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Departmen Dirjen Bina Lembaga Koperasi. Jakarta: 1992.

PEDOMAN WAWANCARA:

1. Siapa saja yang berhak menerima KUT
2. Untuk kebutuhan apa KUT disalurkan
3. Siapa yang berhak mengajukan KUT
4. Kapan diajukannya permohonan perolehan KUT
5. Bagaimana cara pencairan KUT apa sesuai jadwal
6. Apa ada surat permohonan Kredit dari Koperasi/LSM kepada Bank Umum pelaksana
7. Berapa besar jumlah KUT yang telah disalurkan
8. Yang menandatangani akad kredit apa oleh Koperasi/LSM dengan pimpinan cabang BRI dan dilegalisir oleh KakandepKop/LSM.
9. Pencairan kredit dilakukan oleh pengurus Koperasi/pengurus LSM langsung kepada Bank yang telah ditunjuk.
10. Apakah dana yang diberikan untuk membiayai usaha tani, intensifikasi padi/palawija dan hortikultura yaitu pisang, nenas, pepaya, markisa, jeruk, salak, cabe merah, bawang merah, kentan dan jahe.
11. Bagaimana realisasi penyaluran dana tersebut
12. Bagaimana manfaat penggunaan dana yang diperoleh para petani.
13. Bagaimana sistem dan realisasi pengembalian dana KUT di Sultra.
14. Kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka prioritisasikan untuk pengembangan masyarakat lebih lanjut.
15. Masalah/Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut.
16. Bagaimana kondisi hasil fisik dengan adanya bantuan KUT.
17. Bidang-bidang pelaksanaan Program:
 - Sistem penentuan kelompok sasaran
 - Sistem penyaluran bantuan
 - Jumlah bantuanyang diterima

- Kondisi penentuan yang diterima
- Pemanfaatan bantuan program
- Mekanisme pengembalian bantuan

18. Dampak Program:

- Dampak terhadap aktivitas kelompok tani/nelayan
- Dampak terhadap produktivitas dan defersivikasi
- Dampak terhadap aksesibilitas dan pelayanan desa
- Dampak terhadap lingkungan hidup
- Dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam peman gunan.
- Dampak terhadap penguatan fungsi institusional pedesaan
- Dampak terhadap peningkatan sarana dan prasarana fisik.
- Bagaimana manfaat secara fisik setelah mereka memperoleh KUT.
- Sampai sejauhmana tingkat keberhasilan program dalam menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan.
- Apa manfaat yang diperoleh dengan adanya program KUT dan bagaimana tindak lanjut penanganan masyarakat.